

**PENGARUH DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA DAERAH
PADA KABUPATEN DAN KOTA DI INDONESIA**

ARTIKEL

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Pada Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Padang*



OLEH :

Yolanda Wulandari
2009/13065

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2014

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENGARUH DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA DAERAH PADA
KABUPATEN DAN KOTA DI INDONESIA**

Oleh:

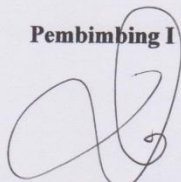
**YOLANDA WULANDARI
2009/13065**

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi/tesis untuk persyaratan wisuda periode Maret
2014 dan telah diperiksa/ditetujui oleh kedua pembimbing

Padang, 4 Februari 2014

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Deviani, SE, M.Si, Ak
NIP. 1960610 199802 2 001

Pembimbing II



Charoline Cheisvivyann, SE, M.Ak
NIP. 1980 1019 200604 2 002

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten dan Kota di Indonesia

Yolanda Wulandari

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang
Email: yolandawulandari20@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji: Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah. Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Populasi penelitian ini adalah kabupaten dan kota se-Indonesia tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Sampel penelitian ini ditentukan dengan metode *random sampling* sehingga diperoleh 96 kabupaten dan kota yang menjadi sampel. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi sederhana. Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana dengan tingkat signifikansi 0,05 maka hasil penelitian ini menyimpulkan: Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah, dimana nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ atau nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $12,681 > 1,9683$ dan β sebesar 0,274 (H_a diterima). Dalam penelitian ini disarankan: 1) Sebaiknya peneliti selanjutnya agar mengambil sampel kabupaten dan kota yang lebih banyak dan menambah variabel- variabel penelitian lain seperti jenis-jenis penerimaan Pemerintah Daerah lainnya dan variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintah. 2). Diharapkan daerah dapat lebih mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki untuk membiayai pengeluaran daerah berupa belanja daerah.

Kata Kunci: Dana Bagi Hasil, Belanja Daerah

Abstract

This research aimed to test: Influence of the Revenue Sharing Fund to Local Expenditure. This type of research causative research. The population was regencies and cities in Indonesia in 2009 to 2011. The research sample was determined by the method of random sampling in order to obtain 96 counties and cities sampled. The type of data used was secondary data and methods of analysis used was a simple regression analysis. Based on a simple regression analysis with a significance level of 0.05, the result of this study concluded: Revenue Sharing Fund positive significantly effect on the Local Expenditure, where the significance value $0.000 < 0.05$ or $t\text{-count} > t\text{ table}$ is $12.681 > 1,9683$ and β of 0.274 (H_a accepted). This study suggested: 1). For further research, to take more sample and add other variables. 2). For further regencies and citis, to optimize their potential income in order to finance Local Expenditure.

Keywords: Revenue Sharing Fund, Local Expenditure

1. PENDAHULUAN

Reformasi yang bergulir tahun 1998 di Indonesia telah membuat perubahan politik dan administrasi, salah satu bentuk reformasi tersebut adalah perubahan bentuk pemerintahan yang sentralisasi menjadi struktur yang terdesentralisasi. Atas perubahan ini dikeluarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah karena dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Menurut UU No. 33 tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan ekonomi yang hendak dicapai melalui desentralisasi adalah mewujudkan kesejahteraan melalui penyediaan pelayanan publik yang lebih merata dan memperpendek jarak antara penyedia layanan publik dan masyarakat lokal (Kusnandar, 2012).

Penyelenggaraan pemerintah melalui otonomi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat (Kusnandar, 2012). Otonomi daerah menekankan terhadap peranan dan kemampuan pemerintah daerah dalam pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah yang diupayakan bertambah besar. Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya merupakan pelaksanaan desentralisasi kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah

tangganya sendiri, menggali pendapatan daerah dan mengalokasikan dana bagi pelayanan umum, serta kewenangan dalam pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah (UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah). APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi Pemda dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Salah satu komponen terpenting dalam APBD adalah belanja daerah. Dalam era desentralisasi fiskal sekarang ini, melalui belanja daerah diharapkan adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik. Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Dengan demikian belanja daerah dapat diartikan sebagai belanja yang dikeluarkan oleh daerah yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali yang digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urrusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang akan mendukung pelaksanaan desentralisasi.

Pada umumnya pemerintah daerah dalam hal belanja dan pembiayaan daerah masih bergantung terhadap pemerintah pusat. Hal ini dapat dilihat dari sumber pendapatan yang dimiliki daerah masih didominasi oleh sumbangan dan bantuan pemerintah pusat, dan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat pasca otonomi daerahpun masih cenderung besar yaitu dengan mengandalkan pada sumber-sumber pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan dana pinjaman. Seperti yang dikemukakan oleh Tambunan dalam Dasril Munir (2004), yang menyatakan bahwa peranan/kontribusi penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk transfer, sumbangan dan bantuan, bagi hasil pajak dan bukan pajak, mendominasi susunan APBD. Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD sebenarnya merupakan output pengalokasian sumber daya. Pemerintah daerah dituntut kejelian dalam melakukan pengalokasian sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya pendapatan dari daerah itu sendiri, maupun sumber daya penerimaan dari luar, berupa Dana Perimbangan dari Pusat.

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan tanggungjawabnya untuk dapat memberikan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dana perimbangan tersebut terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Bagi Hasil sebagai salah satu komponen dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Ahmad, 2002). Dana Bagi Hasil yang ditransfer

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari dua jenis, yaitu Dana Bagi Hasil pajak dan Dana Bagi Hasil bukan pajak (Sumber Daya Alam). Daerah yang memiliki kekayaan alam dan penghasilan pajak akan memiliki penerimaan daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan sumber-sumber tersebut oleh pemerintah pusat untuk membiayai belanja daerahnya (Nazarullah,). Hasil dari pengelolaan sumber daya tersebut dialokasikan kepada daerah-daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) dengan menggunakan prinsip *by origin* (daerah penghasil) serta melihat realisasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Wahyuni dan Pryo, (2009) menyebutkan bahwa “Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah selain yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)”. Armayani dalam Halim (2004), menyatakan bahwa peran pemerintah di dalam pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator, karena pihak pemerintahlah yang lebih mengetahui sasaran tujuan pembangunan yang akan dicapai. Sasaran dan tujuan kegiatan pembangunan dan perekonomian daerah dalam rangka desentralisasi dapat diwujudkan dengan mengeluarkan belanja daerah dimana penerimaan dalam pengeluaran belanja dapat diterima dari Dana Bagi Hasil dan dikeluarkan dengan anggaran, alokasi dan proporsi yang tepat.

Menurut Carol (2005), Dana Perimbangan dimaksudkan untuk mengatasi ketidakseimbangan vertikal antar tingkat pemerintah (dana bagi hasil & dana alokasi umum) menyamakan kemampuan fiskal pemerintah daerah mendorong belanja daerah untuk kegiatan-kegiatan prioritas pembangunan nasional, mendorong pencapaian pelayanan dan

standar minimum, dan merangsang mobilisasi pendapatan.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil yang diterima oleh setiap daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah yang didalamnya sudah termasuk belanja.

Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi Dana Bagi Hasil terhadap penerimaan daerah masih cukup tinggi. Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pasokan dana dari pemerintah pusat ini. Namun demikian, dalam jangka panjang, ketergantungan semacam ini harus semakin kecil. Menurut Alfian (2009) berbagai investasi yang dilakukan pemerintah daerah diharapkan memberikan hasil yang positif.

Terlihat berdasarkan teori-teori diatas bahwa Dana Bagi Hasil tahun berjalan yang merupakan pendapatan daerah yang ditransfer dari pemerintah pusat dapat digunakan untuk mendanai pelaksanaan belanja daerah.

Fenomena yang terjadi, yaitu bagaimana gambaran belanja daerah tahun 2009-2010 pada ketiga pemerintah kabupaten/kota di Indonesia yang dipilih secara acak. Rata-rata belanja daerah Kab. Simalungun cukup besar yaitu sekitar Rp.964.253.228.000,00, Kab. Simelue Rp351.148.662.000,00. Pada Kab. Simalungun belanja daerah mengalami peningkatan. Sebaliknya pada Kabupaten Simelue, pengeluaran Pemda dalam belanja daerah tersebut mengalami penurunan

Selanjutnya Dana Bagi Hasil yang didapatkan oleh pemerintah Kabupaten Simalungun menurun dari tahun 2009 ke 2010. Namun hal ini tidak diiringi dengan bertambahnya pula jumlah pengeluaran belanja daerah pada kabupaten tersebut. Sebaliknya Dana Bagi Hasil pemerintah Kabupaten Simelue mengalami kenaikan, namun hal ini juga tidak ini seiring dengan belanja daerahnya yang mengalami penurunan.

Penelitian, Indra (2010) menyatakan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum mempengaruhi besarnya Belanja Daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara secara positif, dengan keterbatasan penelitian yaitu meneliti pada pemerintahan kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara saja. Sedangkan Penelitian lain seperti yang dilakukan oleh Shafi'i (2012) yang meneliti pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah, menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap belanja daerah dan keterbatasan dari penelitian ini yaitu hanya meneliti pada kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat:

1. Bagi peneliti, penelitian ini menjadi sebagai salah satu upaya untuk mendapat pengalaman dan pengetahuan dalam menulis karya ilmiah.
2. Bagi kabupaten dan kota, penelitian ini diharapkan menjadi informasi serta bahan pertimbangan bagi manajemen pemerintahan kabupaten/kota untuk memberikan perhatian terhadap penggunaan belanja daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil.
3. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan menjadi stimultan dan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

2. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Belanja Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan "belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah." Sedangkan menurut Undang Undang

Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah juga menyatakan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.

Halim (2004) menyatakan bahwa, “belanja daerah adalah “pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya.”

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah juga menyatakan bahwa belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan system jaminan sosial.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai belanja daerah diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan

belanja daerah adalah belanja yang dikeluarkan oleh daerah yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali yang digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang akan mendukung pelaksanaan desentralisasi terutama dalam meningkatkan pelayanan masyarakat.

Pengklasifikasian belanja daerah menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah belanja daerah terdiri dari :

1. Belanja aparatur daerah
Bagian belanja yang berupa : belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan yang dialokasikan atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).
2. Belanja pelayanan publik
Bagian belanja yang berupa : belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan yang dialokasikan atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).
3. Belanja bagi hasil dan bantuan
Pengeluaran uang dengan kriteria :
 - a. Tidak menerima secara langsung imbalan barang dan jasa seperti layak terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan.
 - b. Tidak mengharap dibayar kembali pada masa yang akan datang, seperti yang diharapkan pada suatu pinjaman.
 - c. Tidak mengharapkan adanya hasil pendapatan seperti layak yang diharapkan pada kegiatan investasi.
4. Belanja tidak disangka
Pengeluaran yang disediakan untuk :
 - a. Kejadian-kejadian luar biasa seperti bencana alam, kejadian yang dapat membahayakan daerah.
 - b. Utang (pinjaman) periode sebelumnya yang belum diselesaikan

dan atau yang tersedia anggarannya pada tahun yang bersangkutan.

c. Pengembalian penerimaan yang bukan haknya atau penerimaan yang dibebaskan (dibatalkan) dan atau kelebihan penerimaan.

Dalam rangka memudahkan penilaian kewajaran biaya suatu program atau kegiatan, belanja daerah diklasifikasikan menurut kelompok belanja berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung.

1. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, belanja tersebut terdiri dari :

- a. Belanja pegawai,
- b. Belanja bunga,
- c. Subsidi,
- d. Hibah,
- e. Bantuan sosial, Belanja bagi hasil,
- f. Bantuan keuangan dan
- g. Belanja tidak terduga.

2. Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan pemerintah. Belanja ini bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat. Yang termasuk dalam kelompok belanja ini adalah :

- a. Belanja pegawai,
- b. Belanja barang dan jasa dan
- c. Belanja modal.

Bawono, (2008) menyebutkan bahwa “pada praktiknya belanja pemerintah daerah dibagi dalam dalam 2 bentuk seperti yang dapat kita cermati dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, yakni Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan”.

1. Belanja Rutin

Belanja yang wujudnya tidak berupa fisik dan terjadi terus menerus dan menjadi kewajiban daerah sepanjang periode anggaran setiap tahunnya dapat di kategorikan sebagai belanja rutin.

Sebagai contoh belanja gaji dan honorarium pegawai, belanja perjalanan dinas, belanja barang dan belanja lain-lain. Belanja rutin umumnya digunakan untuk membiayai operasional pemerintah dan hasilnya tidak dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat namun selalu menjadi perhatian utama pemerintah daerah.

2. Belanja Pembangunan

Selain belanja rutin pemerintah juga mengeluarkan belanja yang sifatnya tidak rutin dan umumnya menghasilkan wujud fisik yang manfaatnya lebih dari satu tahun yang dapat di kategorikan sebagai belanja pembangunan. Belanja pembangunan dikeluarkan oleh pemerintah yang mana manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat karena memang belanja pembangunan dimaksudkan untuk peningkatan pelayanan publik. Belanja pembangunan ini pada akhirnya akan menghasilkan *capital public* dan dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat.

2. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Deddi, 2007).

Menurut buku dasar penyusunan APBD 2012, bagi pemerintah daerah yang mendapatkan dana Bagi hasil yang cukup besar, seyogyanya pemanfaatan dana tersebut dilakukan secara optimal dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan infrastruktur dasar di daerah.

1). Dana Bagi Hasil Pajak

DBH yang berasal dari pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21. Penetapan alokasi DBH Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan. DBH Pajak sendiri disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum Negara ke rekening kas umum daerah.

Dana Bagi Hasil pajak sendiri terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Penghasilan (PPh), baik dari WP Orang Pribadi dalam Negeri maupun dari PPh 21 (Deddi, 2007).

Pembagian dan mekanisme penghitungan Dana Bagi Hasil, diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 dan PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil Pajak terdiri dari:

- a. Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan
- b. Dana Bagi Hasil Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- c. DBH PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terdiri dari:

- a). DBH Sumber Daya Alam Kehutanan
- b). DBH Pertambangan Umum
- c). DBH Perikanan
- d). DBH Pertambangan Minyak Bumi
- e). DBH Pertambangan Gas Bumi
- f). DBH Pertambangan Panas Bumi

Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Indra (2010), menyatakan bahwa dari hasil yang dilakukan menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan dan parsial berpengaruh positif terhadap belanja daerah (BD) pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2011) yang meneliti pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil terhadap

belanja daerah pada kota Bandung menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, namun Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap belanja daerah.

Hubungan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Deddi, 2007). Menurut Carol (2005), Dana Perimbangan dimaksudkan untuk mengatasi ketidakseimbangan vertikal antar tingkat pemerintah (dana bagi hasil & dana alokasi umum) menyamakan kemampuan fiskal pemerintah daerah mendorong belanja daerah untuk kegiatan-kegiatan prioritas pembangunan nasional, mendorong pebcapaian peayanan dan standar minimum, dan merangsang mobilisasi pendapatan. Menurut Arbie (2013), Dana Bagi Hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Wahyuni dan Pryo, (2009) menyebutkan bahwa “Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah selain yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)”.

Penelitian yang dilakukan oleh Indra (2010), menyatakan bahwa dari hasil yang dilakukan menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan dan parsial berpengaruh positif terhadap belanja

daerah (BD) pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor yang penting yang telah di ketahui dalam suatu masalah tertentu. Kerangka konseptual ini akan menghubungkan antara variabel-variabel penelitian, yaitu variabel bebas dan variabel terikat.

Penelitian ini menggunakan satu variabel bebas Dana Bagi Hasil dan satu variabel terikat yaitu Belanja Daerah. Adapun yang menjadi kerangka konseptual dari penelitian ini adalah pada **Gambar 1 Kerangka Konseptual (lampiran)**.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan proporsi yang dirumuskan dengan maksud untuk diuji secara empiris dan hipotesis merupakan penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ha :Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja daerah.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kausatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas mempengaruhi variabel terikat (Umar,2005). Penelitian ini menjelaskan dan menggambarkan hubungan Dana Bagi Hasil variabel independen dengan belanja daerah di kabupaten/kota di Indonesia sebagai variabel dependennya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Yaitu dengan mengumpulkan seluruh bahan dan

data-data yang diperlukan pada penelitian ini dalam bentuk laporan-laporan berupa Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten dan Kota di Indonesia dari tahun 2009 sampai tahun 2011.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif yaitu data yang diukur dalam suatu skala secara numerik. Sumber data tersebut merupakan data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara yaitu yang diperoleh dari data APBD tahun 2009 dan 2011 Kabupaten dan Kota di Indonesia, yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Sumatera Barat dan berupa data *online* yang ada di situs web <http://bps.go.id>.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi menurut Sugiyono (2008) adalah kumpulan dari seluruh elemen yang sejenis, dapat dibedakan satu sama lainnya, dan disebabkan adanya nilai karakteristik yang berlainan. Sedangkan sampel menurut Sugiyono (2008) adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Populasi penelitian ini adalah kabupaten dan kota yang ada di Negara Indonesia.

Jumlah kota dan kabupaten yang terdaftar pada Badan Pusat Statistik adalah 491 kabupaten/kota. Namun data yang lengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini berjumlah 475 kabupaten/kota.

Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini diambil dengan *pupose sampling*, yaitu dengan kriteria yang memiliki data belanja daerah dan Dana Bagi Hasil lengkap. Dari 491 Kab./Kota yang memenuhi kriteria berjumlah 475 kabupaten/kota. Selanjutnya populasi sebanyak 475 akan dilakukan *random sampling*. *Random sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana semua individu dalam populasi baik secara sendiri atau bersama-

sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel (Sugiyono, 2008).

Penarikan sampel acak dilakukan dengan metode *cluster sampling*, yaitu populasi dibagi atas sub populasi berdasarkan area. Karena komposisi dan pengaruh variabel pada kabupaten dan kota pada satu provinsi yang lain. Tujuan pemilihan sampel adalah agar hasil analisis data berdasarkan sampel dapat digeneralisasi pada tingkat populasinya.

Untuk memperoleh sampel yang mencerminkan karakteristik populasinya secara tepat dalam hal ini tergantung oleh dua factor yaitu: metode pemilihan dan penentuan ukura sampel. Pemilihan sampel secara acak lebih memungkinkan untuk memperoleh sampel yang representatif atau dapat menggambarkan kondisi populasi yang sebenarnya, dibandingkan dengan pemilihan sampel secara tidak acak (Indrianto, 1999).

Ukuran Sampel

Pada penelitian ini akan diambil sampel sebanyak 20% dari 475 populasi yaitu sebanyak 95 kabupaten/kota. Maka digenapkan menjadi 96 kabupaten/kota, sehingga sampel yang diambil dari masing-masing provinsi adalah sebanyak 3 sampel yang diambil secara acak.

Variabel Penelitian dan Pengukurannya Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah belanja daerah. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengukurannya diukur dengan:

$$BD = BTL + BL$$

Keterangan:

BD= Belanja Daerah

BTL= Belanja Tidak Langsung

BL= Belanja Langsung

Variabel Independen (X)

Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen dan mempunyai pengaruh positif atau negatif bagi variabel dependen lainnya. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Dana Bagi Hasil.

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu. Pengukurannya diukur dengan:

$$DBH = DBHP + DBHS$$

Keterangan:

DBH = Dana Bagi Hasil

DBHP= Dana Bagi Hasil Pajak

DBHS= Dana Bagi Hasil SDA

Uji Asumsi Klasik

Sebelum data diolah dengan regresi sederhana maka dilakukan uji asumsi klasik untuk memperoleh keyakinan bahwa data yang diperoleh beserta variabel penelitian layak untuk diolah lebih lanjut. Uji asumsi klasik yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Uji Normalitas Residual

Pengujian normalitas residual adalah pengujian tentang kenormalan distribusi residual. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Uji ini dapat dilihat dengan menggunakan Kolmogorov Smirnovtest. Jika probabilitas > 0.05 maka H_0 diterima, dalam arti data terdistribusi normal. Jika probabilitas data < 0.05 maka H_0 ditolak dan artinya data tidak terdistribusi normal maka perlu adanya perlakuan khusus agar menjadi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah uji yang bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas satu pengamatan yang lain. Untuk

mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat menggunakan uji Gletser. Dalam uji ini, apabila hasilnya $\text{sig} > 0.05$ maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, karena model yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi berarti terdapatnya korelasi antara anggota sampel atau data pengamatan yang diurutkan berdasarkan waktu, sehingga satu data dipengaruhi oleh data sebelumnya. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui ada data atau tidaknya korelasi antara kesalahan-kesalahan yang muncul pada data yang diurutkan pada waktu (*time series*). Model yang baik harus bebas dari autokorelasi. Pengujian autokorelasi menggunakan model *Durbin-Watson*. Uji statistik *Durbin-Watson* menguji bahwa tidak terdapat autokorelasi pada nilai sisa. Kriteria pengujian *Durbin-Watson* adalah sebagai berikut:

- Bila angka DW < -2 berarti ada autokorelasi yang positif
- Bila angka DW -2 sampai dengan $+2$ berarti tidak ada autokorelasi
- Bila angka DW > 2 berarti ada autokorelasi negatif

Teknik Analisis Data

a. Uji Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi (R^2) pada intinya adalah untuk mengukur kemampuan model dalam memerangkan variansi variabel dependen. Koefisien determinasi berkisar dari nol sampai dengan satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Hal ini berarti bila $R^2 = 0$ menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, bila R^2 semakin besar mendekati 1 menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan bila R^2 semakin kecil mendekati nol maka dapat dikatakan semakin

kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

b. Persamaan Regresi

Analisis data menggunakan regresi sederhana dimana hanya terdapat satu variabel bebas dan satu variabel terikat, yang berguna untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen.

Persamaan regresi yang digunakan adalah:

$$Y = a + bX$$

Dimana:

- Y = Belanja Modal
- a = Koefisien Konstanta
- b = Koefisien Regresi
- X = Dana Bagi Hasil

c. Uji Hipotesis

Dalam melakukan uji hipotesis dilakukan uji t (*t-test*). Pengujian ini digunakan untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel secara individu terhadap variabel tidak bebas untuk melihat nilai signifikansi masing-masing parameter yang diestimasi.

Kriteria pengujian menggunakan tingkat kepercayaan (α) untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau ($\alpha = 0,05$):

Jika tingkat signifikansi $\leq \alpha = 0,05$ dan koefisien (β) positif, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif diterima (H_a). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah.

Selain kriteria tersebut, untuk menguji apakah secara terpisah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik, dengan rumus (Ghozali, 2001):

$$t\text{-test} = \frac{\beta_i}{s\beta_i}$$

Yaitu:

- β_i = koefisien regresi
- $s\beta_i$ = Standar error atas koefisien regresi variabel

Dengan kriteria pengujian:

- a) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_a diterima
 b) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_a ditolak

Definisi Operasional

Definisi operasional memberikan pengertian terhadap konstruk atau memberikan variabel dengan menspesifikasikan kegiatan atau tindakan yang diperlukan peneliti untuk mengukur. Dilihat dari sudut pandang hubungannya variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen pada penelitian ini adalah Dana Bagi Hasil dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Sedangkan variabel dependen adalah Belanja Daerah.

1. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah realisasi belanja yang tertuang dalam APBD pemerintah daerah yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah tersebut.

2. Dana Bagi hasil

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu. Dana Bagi Hasil adalah bagian daerah yang berasal pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas bumi dan bangunan, serta dari hasil-hasil kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi.

4. TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Temuan Penelitian

Gambaran Umum Negara Indonesia

a. Kondisi Geografis

Wilayah Indonesia terletak antara 6° Lintang Utara hingga 11° Lintang Selatan, serta antara 95° Bujur Timur hingga 141° Bujur Timur.

Batas-batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi:

- Sebelah Utara : Negara Malaysia (Bagian Timur), Laut Malaysia, Laut Singapura, Laut Thailand, Laut Vietnam dan Laut Filipina.
- Sebelah Selatan : Darat Timor Leste, Perairan Australia dan Samudera Hindia.
- Sebelah Timur : Daratan Papua New Guinea dan perairan Samudera pasifik.
- Sebelah Barat : Samudera Hindia dan perairan Negara Hindia.

b. Kondisi Demografi

Penduduk Indonesia merupakan penduduk keempat terbanyak didunia dengan kurang lebih berjumlah 250 juta jiwa.

Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku istiadat. Walaupun berbeda agama dan adat istiadat, kehidupan bersama berlangsung rukun dan damai dengan Pancasila sebagai pedoman hidup.

c. Potensi Wilayah

Sumberdaya wilayah di Indonesia sangat dipengaruhi oleh aspek geografis secara keruangan, kelingkungan maupun kewilayahan. Sebagai Negara kepulauan yang luas dengan jumlah pulau yang banyak memiliki sumberdaya laut dan daratan yang perlu dikelola secara terintegrasi. Aspek klimatologi, geologis, dan manusia yang beragam sangat penting dikaji dalam mengelola sumberdaya wilayah untuk kesejahteraan bangsa.

Selain dari segi sumber daya alam, dengan banyaknya penduduk di Indonesia, serta Republik Indonesia yang berbadan hukum merupakan salah satu potensi ekonomi Indonesia dalam hal pendapatan Negara dan daerah di Indonesia, salah satunya yaitu dengan pemungutan Pajak.

Statistik Deskriptif

Berdasarkan data Laporan Realisasi Belanja Belanja Daerah, dan Dana Bagi Hasil maka didapat hasil analisis statistik deskriptif yang dapat dilihat dari **tabel 2 (lampiran)**.

Berdasarkan tabel 2, nilai rata-rata belanja daerah adalah Rp.600.816.128.000,-. Nilai Belanja Daerah tertinggi adalah Kabupaten Sukabumi tahun 2011 sebesar Rp.1.850.313.979.000, terendah adalah Kabupaten Mamuju Utara Rp.144.551.366.000 pada tahun 2010.

Nilai rata-rata Dana Bagi Hasil adalah Rp.91.844808.000. Nilai Dana Bagi Hasil tertinggi adalah Kabupaten Berau tahun 2011 sebesar Rp.924.413.561.000, terendah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun yaitu berjumlah Rp.12.776.287.000,-.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Residual

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan *Kolmogorof Smirnov* (K_s), dengan melihat perbandingan nilai signifikansi yang dihasilkan $> 0,05$ maka distribusi datanya dikatakan normal. Sebaiknya jika signifikansi yang dihasilkan $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi secara normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada **tabel 3 (lampiran)**.

Setelah dilakukan transformasi data dengan menggunakan *doublelog*, kembali dilakukan uji normalitasnya dan diperoleh hasil olahan data *Kolmogorof* dengan model unstandardized yang terdapat dalam **tabel 3 (lampiran)**.

Dari tabel 3 terlihat bahwa hasil uji normalitas menunjukkan level signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu $0,300 > 0,05$ untuk variabel belanja daerah dan Dana Bagi hasil. Dengan demikian dapat dinyatakan data dari kedua variabel penelitian telah terdistribusi normal sehingga layak dipakai untuk analisis regresi sederhana.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari suatu residual atas suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi adanya gejala heteroskedastisitas dilakukan uji *Gletser*. Gangguan heteroskedastisitas terjadi jika terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya yang dilihat pada **tabel 4 (lampiran)**.

Dalam uji ini, apabila hasilnya $\text{sig} > 0,05$ maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, model yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai $\text{sig} 0,603$ untuk variabel Dana Bagi Hasil. Maka disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada penelitian ini.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan pengujian asumsi dalam regresi dimana variabel dependen tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri. Dari tabel dibawah didapatkan nilai Durbin-Watson (DW hitung) sebesar 1,085. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan DW hitung berada diantara -2 dan 2, yakni $-2 \leq 2 \leq 2$ maka ini berarti tidak terjadi autokorelasi. Sehingga kesimpulannya adalah Uji Autokorelasi terpenuhi. Adapun hasil pengujiannya dapat dilihat pada **tabel 5 (lampiran)**.

Teknik Analisis Data

a. Koefisien determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel independen. Artinya semakin besar nilai R^2 maka akan semakin baik

model regresi dengan data yang ada, sehingga semakin tepat model ini bisa digunakan untuk menjelaskan variabel dependen oleh variabel independen. Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan proporsi yang diterangkan oleh variabel independen dalam model terhadap variabel terikat, sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Pada penelitian ini hasil uji koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada **tabel 6 (lampiran)**.

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R²* yang diperoleh sebesar 0,358. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 35,8% dan sebesar 64,2% ditentukan oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

b. Persamaan Regresi

Untuk mengungkap pengaruh variabel yang dihipotesiskan dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis regresi sederhana. Model regresi yang digunakan terdiri dari 1 variabel bebas yaitu Dana Bagi Hasil (X), dan satu variabel terikat yaitu Belanja Daerah (Y). Hasil pengolahan data yang menjadi dasar dalam pembentukan model penelitian ini ditunjukkan dalam **tabel 7 (lampiran)**.

Berdasarkan tabel 7 tersebut dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut:

$$BD = 15,260 + 0,274 DBH$$

Keterangan:

BD = Belanja Daerah

DBH = Dana Bagi Hasil

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa:

- a). Nilai konstanta sebesar 15,260, artinya jika Dana Bagi Hasil nilainya 0 maka Belanja Daerah nilainya negatif sebesar 15,260.
- b). Koefisien regresi variabel Dana Bagi Hasil mengalami peningkatan

sebesar 0,274, artinya jika Dana Bagi Hasil mengalami kenaikan satu rupiah, maka Belanja Daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0,274 rupiah. Koefisien bernilai positif artinya semakin tinggi Dana Bagi Hasil maka semakin meningkat juga Belanja Daerah.

c. Uji Hipotesis

Uji t statistik (*t-test*) digunakan dalam pengujian hipotesis untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara parsial. Pengujian yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai signifikansi yang dihasilkan dengan α sebesar 0,05. Berdasarkan hasil analisis di atas, maka dapat diketahui pengaruh antara variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen pada uraian berikut ini:

- Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah. Pada tabel 7 tersebut dapat dilihat bahwa Dana Bagi Hasil memiliki signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 12,681 > t_{tabel} 1,9683$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Dana Bagi Hasil (X) berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah (Y), sehingga hipotesis alternatif (H_a) diterima. Ini berarti bahwa semakin tinggi Dana Bagi Hasil maka semakin tinggi belanja daerah tersebut.

Pembahasan

Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah

Hipotesis alternatif dalam penelitian ini adalah Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah. Dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $12,681 > 1,9683$, dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian hipotesis alternatif yang

menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah diterima.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Indra (2010) dan Syukran (2012) yang menghasilkan bahwa Dana Bagi Hasil memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Dan hal ini juga sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil dapat mendorong belanja daerah untuk kegiatan-kegiatan prioritas pembangunan nasional.

Presentase Dana Bagi Hasil cukup besar yaitu sebesar 35,8% yang dilihat dari Adjusted R Square-nya. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap pemerintah pusat dalam membiayai pengeluaran dan belanja daerah. Namun demikian, dalam jangka panjang, ketergantungan semacam ini harus semakin kecil. Menurut Alfani (2009) berbagai investasi yang dilakukan pemerintah daerah diharapkan memberikan hasil yang positif, agar pemerintah daerah lebih mandiri dapat memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di daerahnya untuk dapat memenuhi belanja daerah dan tidak bergantung pada pemerintah pusat dalam hal membiayai pengeluaran dan belanja pemerintah daerah.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah Dana Bagi Hasil dapat mempengaruhi belanja daerah pada kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2009-2011.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini adalah Dana Bagi Hasil menunjukkan pengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah periode 2009-2011, dilihat dari signifikansi $0,000 < 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$. Pemerintah daerah yang memiliki DBH tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja daerahnya juga semakin tinggi.

Keterbatasan Penelitian

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian ini sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel bebas yaitu Dana Bagi Hasil untuk menguji pengaruhnya terhadap variabel terikat belanja daerah. Penggunaan satu variabel belum mampu menjelaskan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi belanja daerah.
2. Peneliti hanya menggunakan data 3 tahun, sehingga tidak dapat diketahui kecenderungan antar waktu untuk periode yang lebih lama.
3. Penelitian ini menggunakan random sampling yaitu hanya menjadikan beberapa kabupaten/kota yang dapat dijadikan sampel dalam penelitian.

Saran

Dari kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini, maka dapat diberikan saran berikut ini:

1. Bagi peneliti selanjutnya, agar mengambil sampel kabupaten/kota yang lebih banyak dan menambah variabel-variabel penelitian lain, seperti jenis-jenis penerimaan Pemerintah Daerah lainnya, dan variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintah, kondisi makro-ekonomi. Hal ini dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih akurat dan menunjukkan apakah penelitian dengan menggunakan sampel yang banyak dan variabel yang lebih bervariasi dapat memberikan hasil yang berbeda atau sama.
2. Pada saat ini Dana Bagi Hasil memberikan kontribusi atau pengaruh yang kuat terhadap belanja daerah pada kabupaten dan kota di Indonesia. Diharapkan daerah dapat lebih mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki untuk membiayai pengeluaran daerah berupa belanja daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhini. 2011. *Pengaruh rasio keuangan daerah terhadap belanja modal untuk pelayanan publik dalam perspektif teori keagenan (studi pada kabupaten dan kota di Jawa Tengah)*. Jurnal, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. 2013. *Statistik Keuangan Pemerintahan Kabupaten dan Pengalaman di Berbagai Negara*. Jakarta.
- Colfer, Carol J Pierce & Capistrano, Doris. 2005. *Politik Desentralisasi, Kekuasaan dan Pengalaman di Berbagai Negara*. Jakarta.
- Wandira, Arbie Gugus. 2013. *Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap pengalokasian belanja modal*. Accounting Analysis Journal. Universitas Negeri Semarang.
- Gainau, Aldrin W. 2012. *Analisis Kemampuan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum dalam Memenuhi Kebutuhan Belanja Daerah Kabupaten Keerom*. Jurnal Ilmu Sosial, Vol 10.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- Harahap, Alfian. 2009. *Pengaruh Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di Sumatera Utara*. Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Hidayat, Syarif. 2010. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Terhadap belanja modal*. Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.
- Kusnandar, Dodik Siswantoro. 2012. *Pengaruh dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah terhadap belanja modal*. Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi, Yogyakarta.
- Nazarullah, 2011. *Pengaruh Dana Bagi Hasil Migas dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Utara*. Skripsi. Aceh Utara. Aceh utara.
- Noordiawan, Deddi. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang keuangan Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akuntansi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Keuangan Daerah.
- Perdirjen Perbendaharaan No. PER-33/PB/2008 tentang pedoman penggunaan akan pendapatan, belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal sesuai dengan peraturan menteri keuangan nomor 91/PMK.05/2007.
- Redaksi Sinar Grafika, 2005. *Standar Akuntansi Pemerintah (PPRI No. 24 Th.2005)*, Sinar Grafika.
- Republik Indonesia, 2004. *Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia, 2004. *Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia, 2004. *Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*.
- Setiawan, Dian. 2011. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bandung)*. Skripsi. Bandung
- Sugiyono, 2005. *Metode Penelitian Bisnis* Cetakan Kedelapan, Alfabeta, Bandung.
- Shafi'I, Mochamad Syukron. 2012. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana*

Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). Skripsi Universitas uria Kudus.

Syahputra, Indra. 2010. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal Ilmu Sosial.

Umar, Husein. 2003. *Metode Riset Akuntansi Cetakan Kedua*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Usri, Laylil. 2012. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara)*. Skripsi, Jurusan Akuntansi, Kekhususan Akuntansi Pemerintahan Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan.

Wahyuni dan Adi, Hari Pryo. 2009. *Analysis Pertumbuhan Dan Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Daerah*. Jurnal Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Surabaya.

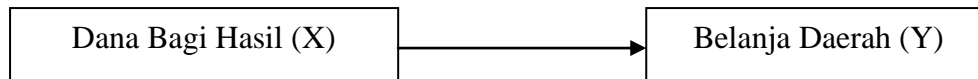
Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

www.bps.go.id

www.depkeu.co.id

LAMPIRAN

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Tabel 1. Kota/Kabupaten Sampel

No.	Nama Daerah	No.	Nama Daerah
	Provinsi Aceh		Provinsi Kepulauan Riau
1	Kab. Aceh Singkil	28	Kota Tanjung Pinang
2	Kab. Aceh Tengah	29	Kab. Karimun
3	Kota Sabang	30	Kab. Kepulauan Riau
	Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Jawa Barat
4	Kab. Tapanuli Tengah	31	Kab. Sukabumi
5	Kab. Toba Samosir	32	Kab. Cianjur
6	Kab. Samosir	33	Kota Sukabumi
	Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Jawa Tengah
7	Kab. Kepulauan Mentawai	34	kab. Kebumen
8	Kab. Pesisir Selatan	35	Kab. Wonogiri
9	Kota Padang	36	Kota Salatiga
	Provinsi Riau		Provinsi Yogyakarta
10	Kab Rokan Hulu	37	Kab. Kulonprogo
11	Kab. Pelalawan	38	Kab. Gunung Kidul
12	Kota Dumai	39	Kota Yogyakarta
	Provinsi Jambi		Provinsi Jawa Timur
13	Kab. Kerinci	40	Kab. Lumajang
14	Kab. Sarolangun	41	Kota Kediri
15	Kab. Muaro Jambi	42	Kota Blitar
	Provinsi Sumatera Selatan		Provinsi Banten
16	Kab. Lahat	43	Kab. Pandegelang
17	Kab. Ogan Ilir	44	Kab. Lebak
18	Kota Prabumulih	45	Kab. Serang
	Provinsi Bengkulu		Provinsi Bali
19	Kab. Kaur	46	Kab. Tabanan
20	Kab. Seluma	47	Kab. Gianyar
21	Kab. Rejang Lebong	48	Kab. Klungkung
	Provinsi Lampung		Provinsi NTB
22	Kab. Tanggamus	49	Kab. Lombok Barat
23	Kab. Lampung Selatan	50	Kab. Sumbawa
24	Kota Metro	51	Kab. Bima
	Provinsi Bangka Belitung		Provinsi NTT
25	Kab. Bangka Selatan	52	Kab. Sumba Barat
26	Kab. Belitung Timur	53	Kab. Manggarai Barat
27	Kota Pangkal Pinang	54	Kab. Nagekeo

Tabel 1. Kota/Kabupaten Sampel (lanjutan)

No.	Nama Daerah	No.	Nama Daerah
	Provinsi Kalimantan Barat		Provinsi Sulawesi Tenggara
55	Kab. Melawi	76	Kab. Buton
56	Kab. Kayong Utara	77	Kab. Wakatobi
57	Kab. Pontianak	78	Kota. Kendari
	Provinsi Kalimantan Tengah		Provinsi Gorontalo
58	Kapuas	79	Kab. Gorontalo
59	Kab. Gunung Mas	80	Kab. Pohuwato
60	Kab. Barito Timur	81	Kab. Bone Bolango
	Provinsi Kalimantan Selatan		Provinsi Sulawesi Barat
61	Kab. Tapin	82	Kab. Mamasa
62	Kota Banjarmasin	83	Kab. Mamuju
63	Kota Banjarbaru	84	Kab. Mamuju Utara
	Provinsi Kalimantan Timur		Provinsi Maluku
64	Kab. Berau	85	Kab. Kepulauan Aru
65	Kab. Bulongan	86	Kab. Maluku Barat Daya
66	Kota Balikpapan	87	Kab. Kota Ambon
	Provinsi Sulawesi Utara		Provinsi Maluku Utara
67	Kab. Bolaang Mongondow Utara	88	Kab. Halmahera Barat
68	Kab. Minahasa Tenggara	89	Kab. Halmahera Selatan
69	Kab. Bitung	90	Kota Tidore Kepulauan
	Provinsi Sulawesi Tengah		Provinsi Papua Barat
70	Kab. Donggala	91	Kab. Fak-Fak
71	Kab. Sigi	92	Kab. Teluk Wondama
72	Kab. Tojo Una-Una	93	Kota Sorong
	Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Papua
73	Kab. Barru	94	Kab. Yapen Waropen
74	Kota Pare-pare	95	Kab. Yalimo
75	Kota Palopo	96	Kab. Dogiyai

Sumber: Badan Pusat Statistik, situs <http://BPS.go.id> (diolah)

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Belanja Daerah	288	144551366	1850313979	6.01E8	2.810E8
Dana Bagi Hasil	288	12776287	924413561	91844808.47	1.492E8
Valid N (listwise)	288				

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		288
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.34294823
Most Extreme Differences	Absolute	.057
	Positive	.057
	Negative	-.041
Kolmogorov-Smirnov Z		.973
Asymp. Sig. (2-tailed)		.300

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.144	.239		.603	.547
	LN_DBH	.007	.013	.031	.521	.603

a. Dependent Variable: ABS_RESIDUAL

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.600 ^a	.360	.358	.34355	1.085

a. Predictors: (Constant), LN_DBH

b. Dependent Variable: LN_BD

Tabel 6. Hasil Uji Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.600 ^a	.360	.358	.34355

a. Predictors: (Constant), LN_DBH

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Sederhana

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15.260	.384		39.768	.000
	LN_DBH	.274	.022	.600	12.681	.000

a. Dependent Variable: LN_BD